Katalog: 4601007.31

PROFIL DEMOKRASI
Provinsi DKI Jakarta
2023

Volume 5, 2024

https://jakarta.bps.go.id

Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta

https://jakarta.bps.go.id

Katalog: 4601007.31

PROFIL DEMOKRASI
Provinsi DKI Jakarta
2023

Volume 5, 2024

https://jakarta.bps.go.id

Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta

PROFIL DEMOKRASI
PROVINSI DKI JAKARTA 2023

Katalog: 4601007.31
Nomor Publikasi: 31000.24064

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman: xii+41 halaman

Penyusun Naskah
BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting
BPS Provinsi DKI Jakarta

Pembuat Kover
BPS Provinsi DKI Jakarta

Penerbit
©BPS Provinsi DKI Jakarta

Sumber Ilustrasi
www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

https://jakarta.bps.go.id

Tim Penyusun

Profil Demokrasi
Provinsi DKI Jakarta 2023
Volume 5, 2024

Pengarah
Nurul Hasanudin

Penanggung Jawab
Dwi Paramita Dewi

Penyunting
Dwi Paramita Dewi

Pengolah Data
Siti Alifah

Penulis Naskah
Siti Alifah

Penata Letak
Kadek Swarniati

Pembuat Kover
Kadek Swarniati

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menyajikan data dan informasi mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di DKI Jakarta. Publikasi ini mencakup aspek, variabel, dan indikator yang relevan. Sebagai lanjutan dari publikasi sebelumnya, laporan ini disusun dengan analisis sederhana guna mempermudah pengguna data dalam memahami dinamika perkembangan demokrasi di Jakarta.

Data yang disajikan terkait dengan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia, baik aspek, variabel, maupun indikator IDI, serta perkembangan dan posisi IDI DKI Jakarta terhadap nasional. Keberhasilan IDI DKI Jakarta menunjukkan keberhasilan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku politik di Jakarta. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau kajian dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan politik di DKI Jakarta.

Kritik dan saran konstruktif barbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi kebutuhan data statistik terkait demokrasi, baik oleh instansi pemerintah, swasta, kalangan akademisi, para pelaku politik, maupun masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2024
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta

Nurul Hasanudin

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR ISI

PROFIL DEMOKRASI PROVINSI DKI JAKARTA 2023

Volume 5, 2024

			Halaman
Kata Pengantar			v
Daftar Isi			vii
Daftar Tabel			ix
Daftar Gambar			xi
BAB I	Pendahuluan		1
	1.1	Latar Belakang	3
	1.2	Tujuan dan Manfaat	4
	1.3	Sistematika Penyajian	4
	1.4	Istilah Teknis	5
BAB II	Metodologi		13
	2.1.	Metodologi Pengumpulan Data	15
	2.2.	Aspek dan Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia	17
	2.3.	Data/Informasi untuk Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia	19
	2.4.	Sumber Data yang Digunakan	23
	2.5.	Penghitungan Indeks	25
BAB III	Perkembangan IDI DKI Jakarta		27
	3.1.	Perkembangan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia	29
	3.2.	Perkembangan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia	32
	3.3.	Perkembangan Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	34
Daftar Pustaka			41

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Indikator dari Aspek Kebebasan Sipil Menurut Sumber Data, 2023	23
Tabel 2.2	Indikator dari Aspek Kesetaraan Menurut Sumber Data, 2023	24
Tabel 2.3	Indikator dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Menurut Sumber Data, 2023	24
Tabel 3.1	Ranking Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2021–2023	31

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Skema Sumber Data Indeks Demokrasi Indonesia	16
Gambar 2.2	Aspek dan Jumlah Indikator Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia	17
Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, Provinsi, Pusat, dan Nasional, 2022-2023	30
Gambar 3.2	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2021–2023	32
Gambar 3.3	Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2021–2023	33
Gambar 3.4	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2023.	34
Gambar 3.5	Aspek Kebebasan Menurut Nilai Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, 2023.	35
Gambar 3.6	Aspek Kesetaraan Menurut Nilai Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, 2023	36
Gambar 3.7	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Menurut Nilai Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, 2023	38
Gambar 3.8	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Indikator, 2021–2023.	40

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

BAB 1
Pendahuluan

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan untuk menilai kemajuan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan gagasan bersama antara Bappenas, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Pemeritah Daerah, dan BPS atas dukungan dari UNDP Indonesia sejak tahun 2007. Sebagai produk resmi pemerintah, saat ini IDI digunakan sebagai ukuran pembangunan politik di Indonesia dan sudah dicantumkan sebagai target pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Sampai dengan tahun 2020, IDI mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia dalam tiga aspek, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution Democracy*). Ketiga aspek demokrasi tersebut dijabarkan kedalam 11 variabel dan 28 indikator. Mulai tahun 2021 penghitungan IDI mengalami perubahan menjadi 22 indikator yang tergabung dalam 3 aspek, yaitu kebebasan (*Freedom*), kesetaraan (*Equality*), dan kapasitas lembaga Demokrasi (*Capacity of Institution of Democrazy*).

IDI saat ini tidak hanya melihat dimensi politik tetapi juga dimensi ekonomi dan sosial, sehingga diharapkan IDI dapat menggambarkan permasalahan demokrasi, berupa ketimpangan akses dan distribusi sumber daya ekonomi. Selain itu juga menggambarkan hambatan demokratis terkait kekuatan oligarki dalam sistem ekonomi dan politik.

https://jakarta.bps.go.id

Publikasi Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2023 disusun guna memberikan informasi terkini terkait kondisi demokrasi di Provinsi DKI Jakarta yang didasarkan pada angka Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan publikasi Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2023 antara lain:

a. Mengukur secara kualitatif tingkat pelaksanaan demokrasi di DKI Jakarta
b. Memberikan gambaran kondisi demokrasi di DKI Jakarta tahun 2023
c. Memberikan gambaran tingkat demokrasi antar provinsi di Indonesia
d. Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi karena dapat menunjukkan bagian mana yang menghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
e. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dapat mengambil langkah-langkah kongkrit berdasarkan kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi di masa mendatang.

https://jakarta.bps.go.id

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Profil Demokrasi di Provinsi DKI Jakarta ini terdiri dari tiga bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat, sistematika penyakin, dan istilah teknis.

Bab II: Metodologi meliputi metodologi pengumpulan data, aspek dan indikator penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, data/informasi untuk

penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, sumber data yang digunakan, dan penghitungan indeks.

Bab III: Potret demokrasi Indonesia meliputi perkembangan capaian Indeks Demokrasi Indonesia, perkembangan capaian aspek Indeks Demokrasi Indonesia, dan perkembangan capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia.

1.4 Istilah Teknis

Istilah penting aspek kebebasan

1) Terjamin adalah tidak mendapat tindakan ancaman atau hambatan dalam kebebasan
2) Ancaman adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu dengan menakuti atau menyampaikan rencana tindakan yang mengadung kekerasan atau penggunaan kekuasaan di luar atauran yang dapat merugikan orang lain. Bentuk ancama kekerasan secara tertulis seperti WA, surat, dll. Termasuk ancaman adalah tindakan pelanggaran.
3) Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, terhadap perorangan, atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau terlanggarnya hak seseorang.
4) Hambatan/gangguan adalah suatu usaha yang memiliki sifat dan tujuan untuk menghalangi atau melemahkan keinginan atau tindakan seseorang.
5) Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah kebebasan bagi semua bergabung dengan organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan/

https://jakarta.bps.go.id

mengganggu kepentingan umum. Ancaman pada kebebasan berkumpul dan berserikat dapat berupa kekerasan, intimidasi, pelarangan, pembatalan, pemberian hukuman, dan hambatan lainnya.

6) Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang, untuk tujuan tertentu seperti rapat, diskusi, seminar, komunitas, dan lain-lain.
7) Berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik secara legal terdaftar (dibuktikan dengan akta notaris dan terdaftar) seperti partai politik atau LSM, maupun tidak terdaftar di lembaga pemerintahan misalnya paguyuban atau komunitas.
8) Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan baik lisan maupun tulisan yang bebas dari tekanan fisik, dan/psikis. Kebebasan berpendapat dilakukan secara bebas namun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat berupa kekerasan, intimidasi, pelarangan, pembatalan, pemberian hukuman, dan hambatan lainnya.
9) Berekspersi adalah suatu tindakan mengungkapkan atau proses menyatakan/menunjukkan gagasan, pemikiran, perasaan, kesukaan, jati diri, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
10) Berpendapat adala suatu tindakan mengeluarkan pikiran, anggapan, pandangan, kehendak, dan perasaan. Bentuk penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan, seperti taklshow, orasi, diskusi, dan

https://jakarta.bps.go.id

wawancara dengan media. Bentuk lain dilakukan secara tertulis melalui opini di koran, atau melalui media sosial.

11) Membatasi adalah tindakan atau pernyataan yang mengurangi, merintangi, menentukan banyaknya, atau tidak membolehkan individu/kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan tertentu.
12) Aturan tertulis dapat berbentuk Perda, Pergub, Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Perintah, dan sebagainya.
13) Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD, pemerintahan kecamatan/ kelurahan, atau struktur birokrasi pemerintahan daerah lainnya pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
14) Aparat negara adalah seluruh jajaran birokrasi pemerintah baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, sipil maupun militer, pejabat maupun staf. Aparat negara di pemerintahan daerah seperti Guberbur, Bupati/Walikota, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), DPRD, hingga paling rendah pada tingkat kecamatan/ kelurahan. Instansi vertikal yang berada di daerah akan dihitung sebagai aparat negara di daerah.
15) Masyarakat yaitu seluruh elemen di luar birokrasi pemerintahan. Termasuk masyarakat adalah organisasi, perusahaan, maupun individu.
16) Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, da tujuan untuk berpatisipasi dalam

https://jakarta.bps.go.id

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU 17/2013).

17) Aparat pemerintahan yaitu semua aparat pemerintahan daerah yang menduduki jabatan seperti: kepala/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, kepala/wakil kepala dinas, camat, lurah/kades. Serta pejabat pusat vertikal di derah baik sipil maupun militer, seperti aparat pengadilan/kejaksaan, aparat Kodam, aparat Polda.
18) Tindakan aparat pemerintah yaitu perbuatan pejabat/aparat pemerintah dalam bentuk penangkapan, penggerebekan, atau penutupan.
19) Pernyataan aparat pemerintahan yaitu Semua pernyataan yang bersifat lisan ataupun tulisan yang dikutip di dalam koran atau terungkap dalam FGD.

    Pernyataan pejabat yang menghambat kebebasan seperti:

    - Ucapan pejabat/aparat bahwa putra daerah harus di utamakan dalam menduduki jabatan tertetu
    - Ucapan pejabat/aparat bahwa perempuan tidak layak menjadi ketua DPRD
    - Ucapan pejabat/aparat bahwa kelompok agama tertentu tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan secara terbuka
    - Ucapan pejabat/aparat bahwa kegiatan agama tertentu dilarang di adakan di daerahnya.

Istilah penting aspek kesetaraan

1) *Hearing* atau *public hearing* adalah upaya yang dilakukan oleh instansi penyelenggara (dalam hal ini adalah DPR RI, DPD RI, atau DPRD Provinsi) untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat

https://jakarta.bps.go.id

pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa yang akan datang.

2) Audiensi adalah pertemuan resmi yang mengundang pihak-pihak terkait atas kepentingan tertentu. Sebagai contoh DPRD Provinsi mengundang serikat pekerja untuk mengetahui aspirasi yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Bisa juga berupa penerimaan aspirasi dari perwakilan demonstran di dalam gedung DPR/DPRD.
3) Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang.
4) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) merupakan salah satu salah satu fungsi pengawasan DPR untuk mengetahui aspirasi atau laporan-laporan mengenai beberapa masalah yang terjadi. RDP biasanya dilakukan dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat juga dilakukan untuk mendengar aspirasi atau pendapat dari masyarakat, dan agenda ini disebut dengan RDPU.
5) Masa Reses adalah kegiatan DPR/DPRD diluar kegiatan masa siding dan diluar gedung, dan masa reses mengikuti masa persidangan. Reses dalam konteks politik memiliki maksa kunjungan yang dilakukan DPR/DPRD ke daerah pemilihannya untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada

https://jakarta.bps.go.id

konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Istilah penting aspek kapasitas lembaga demokrasi

1) Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Jika target Propemperda belum selesai pada tahun berjalan, ranperda yang belum disahkan akan masuk dalam Propemperda tahun berikutnya.
2) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan tahapan proses perencanaan penyusunan undang-undang yang disusun dalams kala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
3) DKPP adalah Dewa Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu sebuah badan yang juga merupakan penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu. DKPP bertugas menerima aduan dan menentukan terkait pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Data netralitas penyelenggara pada tingkat nasional adalah ranah DKPP, sehingga tidak tersedia di Bawaslu.
4) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Banyaknya aparat birokrasi pemerintah yang

https://jakarta.bps.go.id

diputuskan bersalah oleh PTUN mengindikasikan jika keputusan/kebijakan yang dibuat tidak professional.

5) Anggaran Pendapatan dan Belajan Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.
6) Pendidikan Politik adalah adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negeri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang dimaksud dikhususkan pada kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kemampuan berpolitik, ideologi, wawasan kebangsaan, atau berbagai kemampuan yang dapat menunjang kemampuan kader dalam berpolitik, seperti pemahaman UU, kemampuan *public speaking*, dan lain-lain.
7) Kaderisasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menghasilkan kader berkualitas sesuai dengan tujuan partai politik. Kaderisasi merupakan proses internalisasi partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar kedepannya dapat menjadi fungsionaris partai baik dan siap menjalankan mandat yang diberikan partai untuk menduduki jabatan publik di pusat dan daerah.

https://jakarta.bpsgo.id

https://jakarta.bps.go.id

BAB 2
Metodologi

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

BAB II. METODOLOGI

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan mencakup dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data makro yang dikumpulkan melalui analisis berita surat kabar dan reviu dokumen. Sedangkan pengumpulan data secara kualitatif dilakuan pada saat *Focuss Gruop Discussion* (FGD).

2.1 Metodologi Pengumpulan Data

Metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan trianggulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi data yang didapat dengan metode yang lain.

https://jakarta.bps.go.id

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan bersumber pada:

a. Surat Kabar

   Surat kabar yang digunakan satu untuk setiap provinsi mengacu ke surat kabar dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas.

b. Dokumen

   Dokumen yang digunakan berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, surat edaran, dan sebagainya.

c. Big Data

Melakukan *scraping* data yang dilakukan pada tujuh portal berita online meliputi detik, kompas, antara, tirto, kumparan, jpnn, dan tribunnews.

d. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Grop Discussion dilakukan untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru atau menambah informasi dari *stakeholder*.

Gambar 2.1 Skema Sumber Data Indeks Demokrasi Indonesia 2023

Dalam kegiatan pengumpulan data BPS Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi DKI Jakarta. Pokja IDI diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan beranggotakan dinas terkait IDI seperti BPS, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Komisi Informasi, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Dalam ranah pengumpulan data Pokja diharapkan dapat membantu mengakses data-data pemerintah. Dalam ranah pemanfaatan data Pokja IDI mengemban amanat melakukan koordinasi dan sosialisasi hasil IDI dalam rangka penguatan demokrasi.

2.2 Aspek dan Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi disusun dari tiga aspek yang meliputi kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Untuk setiap aspek penyusun Indeks Demokrasi Indonesia terdiri dari beberapa indikator yang seluruhnya berjumlah sebanyak 22 indiktor. Semua indokator tersebut digunakan sebagai indikator penyusun IDI provinsi, tetapi hanya 14 indikator yang digunakan sebagai penyusun IDI pusat. Jumlah indikator dalam setiap aspek penyusun IDI terdapat pada Gambar 2.2.

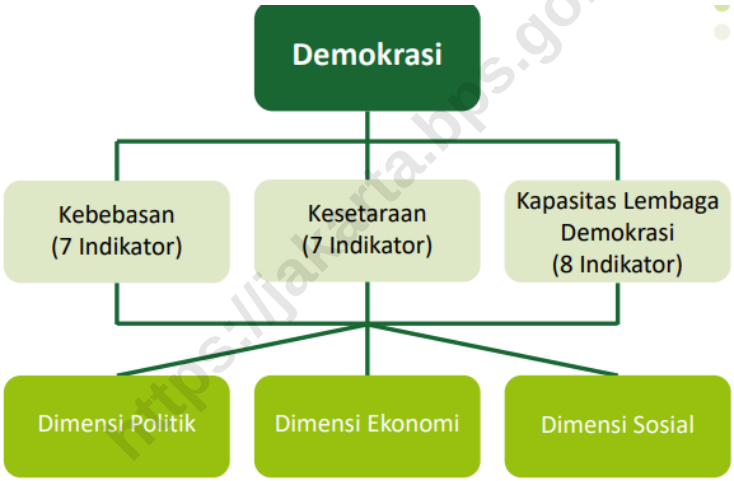

https://jakarta.bps.go.id

Gambar 2.2 Aspek dan Jumlah Indikator Penyusun IDI

2.2.1 Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan mengukur proses sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari tujuh indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

a) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara

b) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat
c) Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
d) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
e) Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat
f) Pemenuhan hak-hak pekerja
g) Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya

2.2.2 Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan ekslusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sector dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memampukan kelompokkelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

a) Kesetaraan gender
b) Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
c) Anti monopoli sumber daya ekonomi
d) Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial
e) Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah
f) Akses masyarakat terhadap Informasi Publik
g) Kesetaraan dalam pelayanan dasar

https://jakarta.bps.go.id

2.2.3 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

a) Kinerja Lembaga Legislatif
b) Kinerja Lembaga Yudikatif
c) Netralitas Penyelenggara Pemilu
d) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
e) Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat
f) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah
g) Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
h) Pendidikan politik pada kader partai politik

https://jakarta.bps.go.id

2.3 Data/Informasi Untuk Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

Bagian berikut akan diuraikan daftar indikator setiap aspek serta data/informasi yang dibutuhkan guna penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi, sebagai berikut:

Aspek Kebebasan meliputi:

a) Indikator 1: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah provinsi per 100.000 penduduk dewasa (17+)
b) Indikator 2: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat per 100.000 penduduk dewasa (17+)
c) Indikator 3: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per 100.000 penduduk dewasa (17+)
d) Indikator 4: Jumlah pemerintah daerah yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan per jumlah pemerintah daerah.
e) Indikator 5: Kasus pelanggaran pemilu per 100.000 pemilih.
f) Indikator 6: Persentase Pekerja yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
g) Indikator 7: Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi.

Aspek Kesetaraan meliputi:

a) Indikator 8: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi.
b) Indikator 9: Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap total anggota DPRD Provinsi.
c) Indikator 10: Indeks Persaingan Usaha Provinsi.
d) Indikator 11: Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi.
e) Indikator 12: Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi.

https://jakarta.bps.go.id

f) Indikator 13: Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi.

g) Indikator 14: Proporsi penduduk dengan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, APM SD – SMA).

Aspek Lembaga Demokrasi meliputi:

a) Indikator 15: Persentase Perda yang disahkan terhadap target Propemperda.

b) Indikator 16: Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan negeri.

c) Indikator 17: umlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaran pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah pemerintah daerah.

d) Indikator 18: Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah pemerintah daerah.

e) Indikator 19: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

f) Indikator 20: Persentase informasi APBD yang tersedia di website Pemda

g) Indikator 21: Indeks Pelayanan Publik Pemda

h) Indikator 22: Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD.

Untuk penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat pusat berikut diuraikan daftar indikator setiap aspek dan data/informasi yang dibutuhkan sebagai berikut:

https://jakarta.bps.go.id

Aspek Kebebasan meliputi:

a) Indikator 1: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah pusat per K/L
b) Indikator 2: tidak ada
c) Indikator 3: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per jumlah K/L
d) Indikator 4: Jumlah K/L yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan per jumlah K/L.
e) Indikator 5: tidak ada
f) Indikator 6: tidak ada
g) Indikator 7: Indeks Kemerdekaan pers NAC

Aspek Kesetaraan meliputi:

a) Indikator 8: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional.
b) Indikator 9: Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR dan DPD (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) yang melibatkan masyarakat, terhadap total anggota MPR.
c) Indikator 10: tidak ada
d) Indikator 11: tidak ada
e) Indikator 12: tidak ada
f) Indikator 13: Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik NAC.
g) Indikator 14: tidak ada

https://jakarta.bps.go.id

Aspek Lembaga Demokrasi meliputi:

a) Indikator 15: Persentase UU yang disahkan terhadap target Prolegnas Prioritas Tahunan.
b) Indikator 16: Persentase putusan terhadap beban kasus di MA dan MK.
c) Indikator 17: Jumlah putusan terkait keberpihakan penyelenggara pemilu per jumlah anggota penyelenggara pemilu.
d) Indikator 18: Kebijakan/keputusan pejabat pemerintah pusat yang dinyatakan bersalah per jumlah K/L.
e) Indikator 19: tidak ada
f) Indikator 20: Informasi APBN yang tersedia di Kemenkeu.
g) Indikator 21: Indeks Pelayanan Publik K/L
h) Indikator 22: Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPR terhadap jumlah partai politik di DPR.

https://jakarta.bps.go.id

2.4 Sumber Data yang Digunakan

Tabel 2.1 Indikator dari Aspek Kebebasan Sipil Menurut Sumber Data, 2023

	Indikator	Sumber Data
	(1)	*(2)*
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Komnas HAM Surat Kabar*) Portal Berita Online FGD
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Komnas HAM Surat Kabar*) Portal Berita Online FGD
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Komnas HAM Surat Kabar*) Portal Berita Online

		FGD
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Peraturan Pemda Komnas HAM
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	Bawaslu
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	Sakernas BPS
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Dewan Pers

Tabel 2.2 Indikator dari Aspek Kesetaraan Menurut Sumber Data, 2023

	Indikator	Sumber Data
	(1)	*(2)*
8	Kesetaraan Gender	BPS
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Komnas HAM Sekretariat DPRD Sekretariat DPR dan DPD Koran Koran Berita Online
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	KPPU
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Susenas BPS
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Sakernas BPS
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Komisi Informasi Pusat
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	BPS

https://jakarta.bps.go.id

Tabel 2.3 Indikator dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Menurut Sumber Data, 2023

	Indikator	Sumber Data
	(1)	*(2)*
15	Kinerja lembaga legislatif	Sekretariat DPRD Prov. Sekretariat DPR
16	Kinerja lembaga yudikatif	Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi
17	Netralitas penyelenggara pemilu	Bawaslu/DKPP
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	PTUN

19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	KLHK
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	Situs Pemda Situs Kemenkeu
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Kementrian PANRB
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	Partai Politik Bakesbangpol Surat Kabar*) Portal Berita Online

*) Khusus untuk pusat tidak menggunakan surat kabar.

2.5 Penghitungan Indeks

Angka IDI terdiri dari tiga indeks, yaitu indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat.

Aspek IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty. AHP dilakukan oleh para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman, pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

BAB 3
Perkembangan IDI DKI Jakarta

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

BAB III. PERKEMBANGAN IDI DKI JAKARTA

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi demokrasi DKI Jakarta berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023. Metode penghitungan IDI tahun 2023 sama dengan yang digunakan pada tahun 2022 lalu, menggunakan metode yang berbeda dibandingkan dengan metode penyusunan periode sebelumnya. Pembahasan akan difokuskan pada perkembangan capaian IDI sepanjang tahun 2021–2023 dengan pertimbangan penghitungannya menggunaan metode yang sama.

https://jakarta.bps.go.id

3.1 Perkembangan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai 84,57, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 82,13 (Gambar 3.1). Kinerja demokrasi sepanjang tahun 2022–2023 dapat dikatakan sangat baik, hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pelaku politik, dan seluruh elemen masayarakat.

Penilaian kinerja demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia semenjak tahun 2021 selain menghitung kinerja demokrasi di tingkat provinsi, juga diukur kinerja demokrasi tingkat Pusat, Nasional dan IDI Provinsi. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat. Nilai IDI Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi.

Dibandingkan dengan nilai IDI Provinsi (agregasi seluruh provinsi) dan nilai IDI Nasional, nilai IDI DKI Jakarta tampak lebih tinggi baik pada tahun 2022 maupun 2023. Nilai IDI Provinsi mencapai 76,08 pada tahun 2021, 77,95

pada tahun 2022 dan 77,21 pada tahun 2023, ketiganya masih di bawah angka 80. Pada IDI Nasional nilainya mencapai 78,12 pada tahun 2021 meningkat menjadi lebih dari 80 pada tahun 2022 yaitu sebesar 80,41 namun turun kembali menjadi 79,51 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, IDI Provinsi tampak mengalami penurunan sebesar 0,74 dan IDI Nasional menurun 0,90 dibandingkan tahun 2022.

Capaian kinerja demokrasi di tingkat Pusat menunjukkan penurunan dari 84,29 menjadi 83,14. Pada tahun 2022, pencapaian demokrasi di tingkat Pusat (84,29) lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta (82,13). Namun, pada tahun 2023, kinerja demokrasi di tingkat Pusat menurun menjadi 83,14, sedikit lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta yang mencapai 84,57. IDI DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 2,44, sedangkan IDI Pusat mengalami penurunan sebesar 1,15.

https://jakarta.bps.go.id

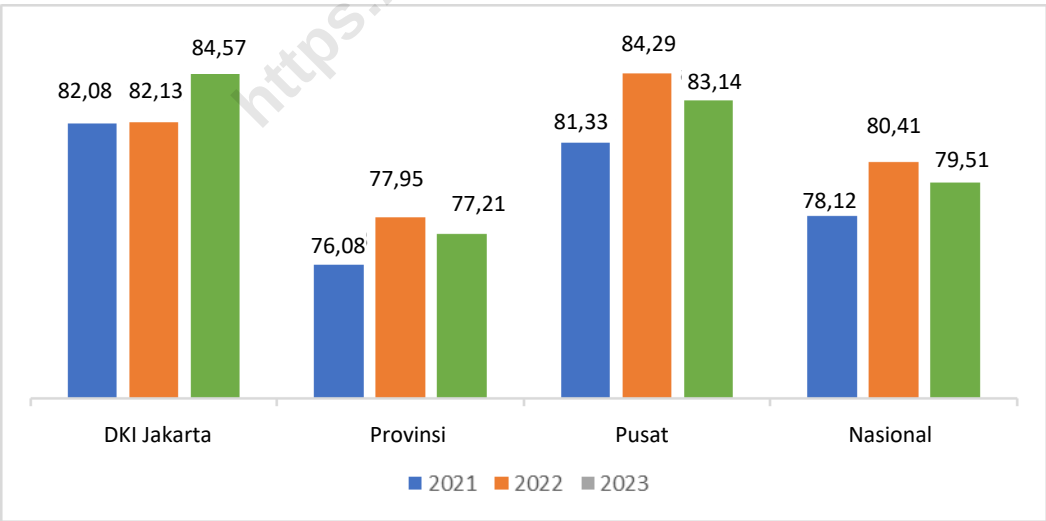

Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, Provinsi, Pusat, dan Nasional, 2021-2023

Pada tahun 2021 dengan capaian IDI Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dibandingkan dengan provinsi lain. Dengan nilai 82,08 IDI Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan IDI Provinsi Jawa Timur (81,31) di urutan kedua, dan DI Yogyakarta (81,21) di urutan ketiga. Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing mempunyai nilai IDI 81,15 dan 81,02 menempati urutan 4 dan 5. (Tabel 3.1).

Pada tahun 2022 dengan nilai IDI sebesar 82,13 Provinsi DKI Jakarta menempati urutan ke tujuh Indeks Demokrasi Indonesia. Ranking pertama capaian IDI pada tahun 2023 adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai IDI sebesar 85,62, disusul Jawa Timur (84,92), dan Jawa Tengah (84,79).

Pada tahun 2023, nilai IDI Provinsi DKI Jakarta sebesar 84,57 menempati urutan kedua. Peringkat pertama ditempati oleh Bali dengan nilai IDI sebesar 85,31, diikuti oleh DI Yogyakarta di urutan ketiga dengan nilai IDI 83,88 dan Jawa Barat di urutan keempat dengan nilai IDI sebesar 83,04.

https://jakarta.bps.go.id

Tabel 3.1 Ranking Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2021-2023

Provinsi	IDI 2021	Rank 2021	IDI 2022	Rank 2022	IDI 2023	Rank 2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
DKI Jakarta	82,08	1	82,13	7	84,57	2
Jawa Timur	81,31	2	84,92	2	82,01	6
DI Yogyakarta	81,21	3	85,62	1	83,88	3
Jawa Tengah	81,15	4	84,79	3	80,87	8
Kalimantan Timur	81,02	5	83,58	4	82,28	5
Jawa Barat	79,72	9	83,34	5	83,04	4
Bali	75,35	21	83,21	6	85,13	1

Gambar 3.2 berikut menunjukkan perkembangan capaian IDI menurut provinsi pada tahun 2021–2023. Tampak bahwa pada tahun 2021 jumlah provinsi dengan nilai indeks demokrasi 80 ke atas sebanyak delapan provinsi termasuk provinsi DKI Jakarta. Jumlah ini kurang lebih sebesar 23,53 persen provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Angka ini meningkat dua kali lipat pada tahun 2022 menjadi sebanyak 14 provinsi atau 41,18 persen provinsi dengan capaian Indeks Demokrasi 80 ke atas. Namun capaian tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 11 provinsi atau 32,35 persen provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.

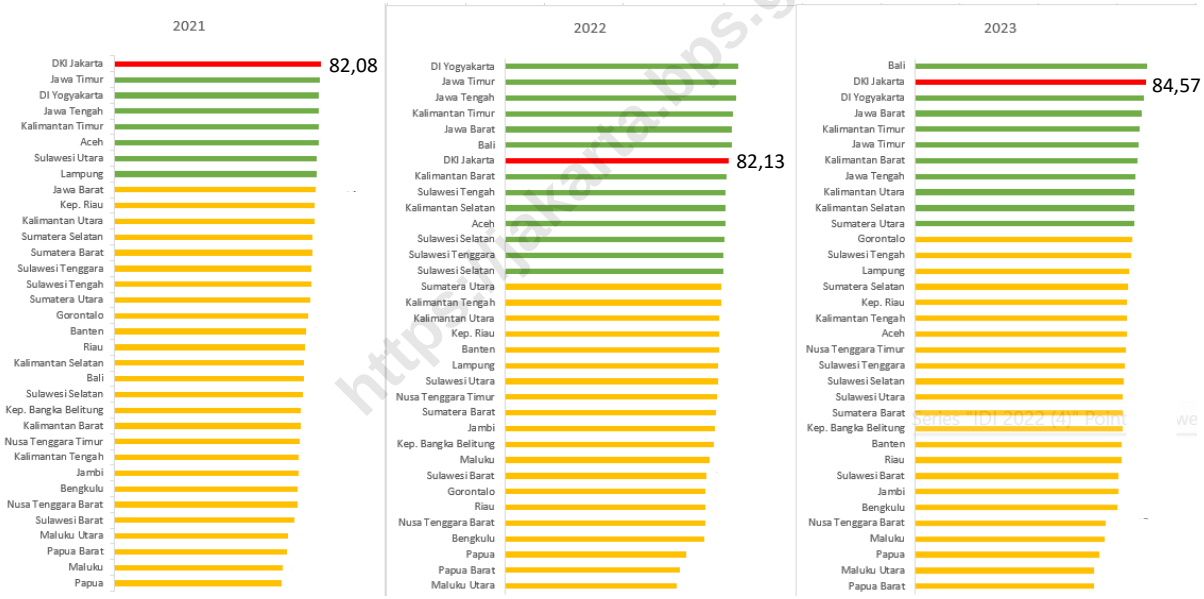

Gambar 3.2 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2021–2023

3.2 Perkembangan Capaian Aspek Indeks Demokrasi Indonesia

Dari ketiga aspek Indeks Demokrasi Indonesia yang meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek lembaga demokrasi tampak bahwa aspek kebebasan mempunyai nilai yang paling tinggi dibandingkan dua aspek lainnya. Pada tahun 2023 aspek kebebasan IDI mencapai 90,66, lebih tinggi

dibandingkan dengan aspek kesetaraan sebesar 86,51, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 76,24.

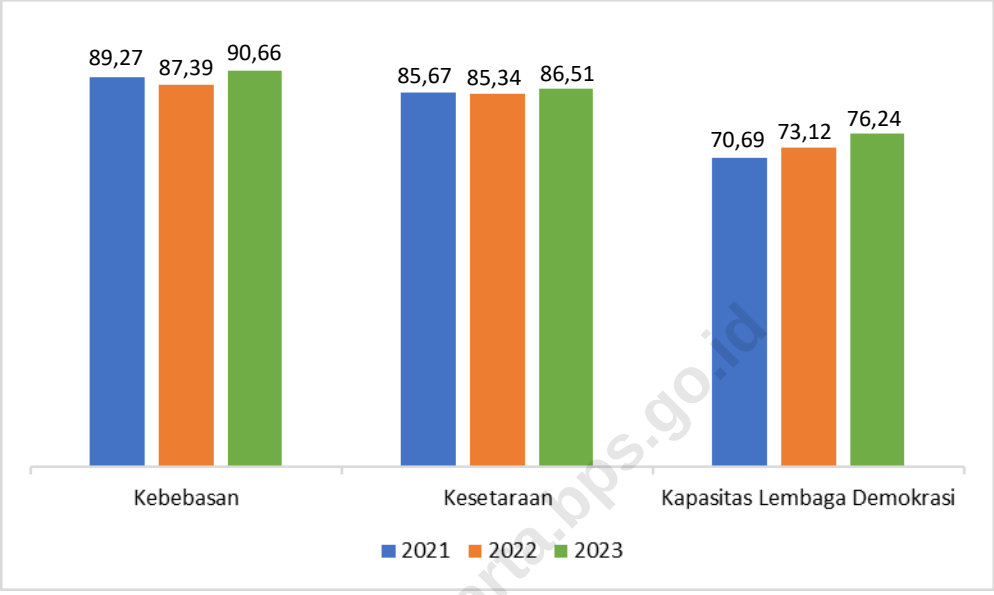

Gambar 3.3 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2021–2023

https://jakarta.bps.go.id

Ketiga aspek tersebut tampak mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022–2023. Aspek kebebasan meningkat dari 87,39 pada tahun 2022 menjadi 90,66 pada tahun 2023, mencapai angka 90 keatas. Aspek kesetaraan juga mengalami peningkatan dari 85,34 pada tahun 2022 menjadi 86,51 pada tahun 2023. Selain itu, aspek kapasistas lembaga demokrasi meningkat dari 73,12 menjadi 76,24 (Gambar 3.3).Peningkatan kinerja pada aspek kapasitas lembaga demokrasi ini akibat peningkatan kinerja indikator didalamnya. Meskipun mengalami peningkatan tetapi kinerja aspek demokrasi masih belum terlalu menggembirakan karena capaian indeksnya masih dibawah angka 80.

Capaian nilai aspek IDI Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dibandingkan dengan rata-rata seluruh provinsi (IDI Provinsi) menunjukkan bahwa aspek

kebebasan dan kesetaraan mempunyai nilai yang lebih tinggi, tetapi aspek kapasitas lembaga demokrasi mempunyai nilai yang lebih rendah. Aspek kapasitas lembaga demokrasi ini baik IDI DKI maupun IDI Provinsi keduanya mempunyai nilai di bawah 80 (Gambar 3.4.).

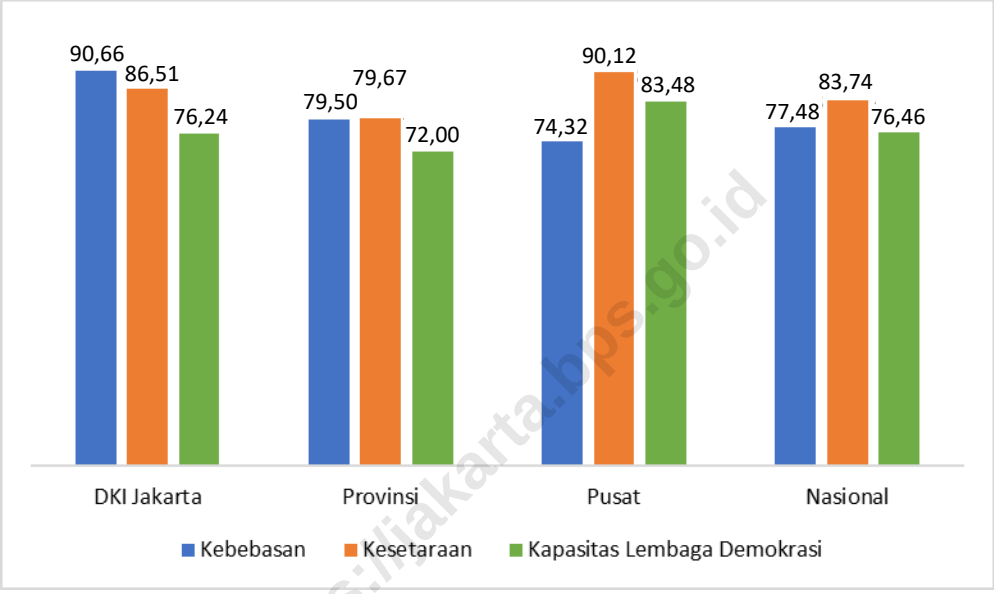

Gambar 3.4 Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2023

https://jakarta.bps.go.id

Capaian aspek IDI DKI Jakarta apabila dibandingkan dengan IDI Pusat dan Nasional, tampak bahwa hanya aspek kapasitas lembaga demokrasi yang mempunyai nilai lebih rendah. Capaian nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI Pusat jauh lebih tinggi dan bahkan sudah melebihi angka 80.

3.3 Perkembangan Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai komponen penyusun IDI baik aspek maupun indikator. Nilai aspek kebebasan IDI tahun 2023 sebesar 90,66 terbentuk dari tujuh indikator penyusunnya. Dari indikator satu sampai dengan tujuh tampak bahwa capaian nilai 100

hanya pada indikator 4 (Gambar 3.5). Hal ini menunjukkan terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2023.

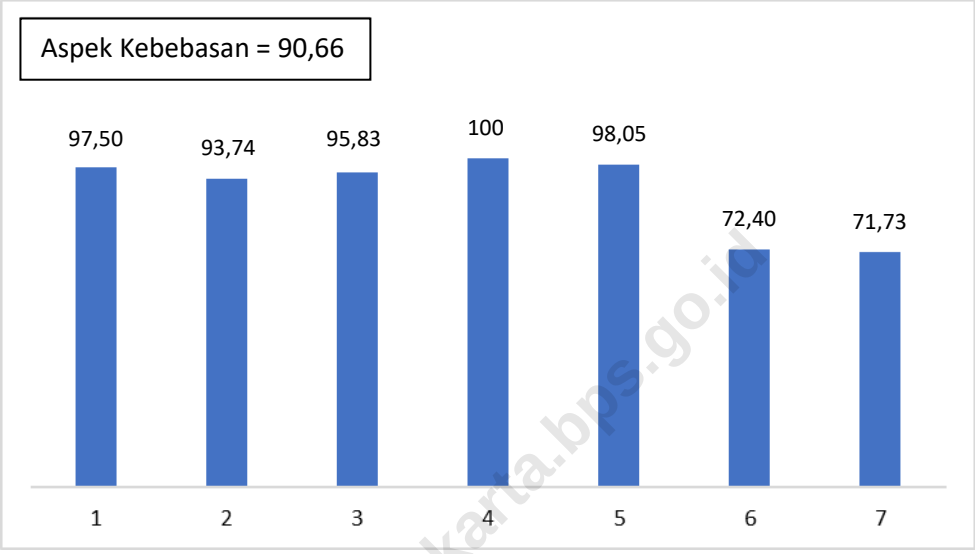

Gambar 3.5 Aspek Kebebasan Menurut Nilai Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, 2023

Keterangan:

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara
2. Terjaminnya kebebaan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat
3. Terjaminnya kebebaan berkeyakinan
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu
6. Pemenuhan hak-hak pekerja
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Indikator dengan capaian nilai terendah terdapat pada indikator 7 yaitu pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini dapat diartikan pers masih mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara bebas di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023. Gambar 3.5 juga menunjukkan bahwa hampir semua indikator penyusun aspek kebebasan

https://jakarta.bps.go.id

pada tahun 2023 telah mempunyai capaian di atas angka 80, kecuali indikator enam dan indikator tujuh. Indikator enam merupakan pemenuhan hak-hak pekerja, dengan capaian nilai sebesar 72,40 pada tahun 2023.

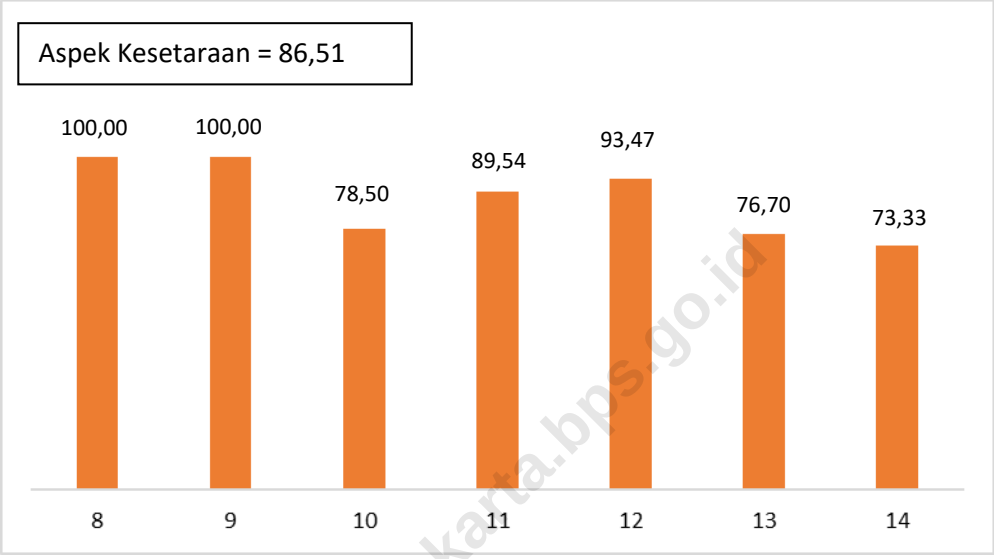

Gambar 3.6 Aspek Kesetaraan Menurut Nilai Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, 2023

Keterangan:

8. Kesetaraan gender
9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
10. Anti monopoli sumber daya ekonomi
11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial
12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah
13. Akses masyarakat terhadap informasi publik
14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi

Capaian aspek kesetaraan IDI tahun 2023 mencapai 86,51 terbentuk oleh indikator penyusunnya dengan capaian per indikator seperti tampak pada Gambar 3.6. Dari indikator delapan sampai dengan 14 terdapat dua indikator yang mempunyai nilai maksimal sebesar 100 yaitu indikator delapan dan indikator sembilan. Indikator delapan berupa kesetaraan gender dan indikator sembilan berupa partisipasi masyarakat dalam memengaruhi

https://jakarta.bps.go.id

kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Indikator berikutnya adalah indikator 12 atau kesetaraan kesempatan kerja antar wiilayah dengan capaian nilai indikator sebesar 93,47. Dapat dikatakan bahwa terdapat kesempatan kerja yang baik di berbagai wilayah, mendukung mobilitas dan distribusi tenaga kerja secara lebih merata di wilayah DKI Jakarta.

Indikator dengan capaian nilai terendah pada aspek kesetaraan adalah indikator 14 yang merupakan kesetaraan dalam pelayanan dasar. Pada tahun 2023 nilai indikator ini hanya sebesar 73,33 yang menunjukkan bahwa belum seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta memiliki hak yang sama terhadap akses sumberdaya ekonomi yang salah satunya adalah pelayanan dasar.

Disamping indikator 14, pada tahun 2023 terdapat indikator pada aspek kesetaraan dengan capaian nilai di bawah 80 yaitu indikator sepuluh dengan nilai 78,50 dan indikator 13 dengan nilai 76,70. Indikator sepuluh menangkap anti monopoli kelompok tertentu dalam sumber daya ekonomi. Capaian nilai indikator sepuluh yang belum maksimal menunjukkan bahwa masih ada kekuasaan yang belum tersebar atau masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini karena demokrasi akan tercapai ketika kekuasaan sudah tersebar dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau telah terjadi demonopolisasi kekuasaan dan sumber daya di ranah politik, ekonomi, dan sosial.

Indikator dengan nilai paling terendah adalah indikator 13 yaitu akses masyarakat terhadap informasi publik. Capaian nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala atau hambatan yang menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi publik secara bebas dan transparan. Dalam konteks demokrasi, akses yang terbatas terhadap

https://jakarta.bps.go.id

informasi publik dapat mempengaruhi partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah.

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mempunyai capaian sebesar 76,24 pada tahun 2023, terbentuk oleh delapan indikator dimulai dari indikator 15 sampai dengan 22. Sebanyak empat indikator mempunyai nilai di atas 80, yaitu indikator 20 dan 22 dengan nilai 100, indikator 18 dengan nilai 92,86 dan indikator 21 dengan nilai 80,60. Indikator dengan capaian terendah adalah indikator 19 dan 15 masing-masing sebesar 54,57 dan 36,84 (Gambar 3.7).

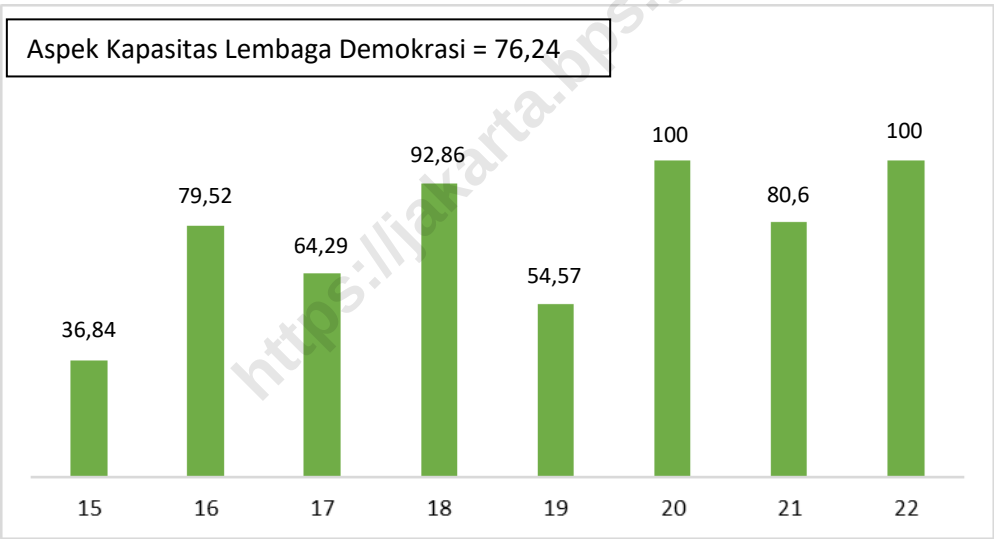

https://jakarta.bps.go.id

Gambar 3.7 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Menurut Nilai Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia, 2023

Keterangan:

15. Kinerja lembaga legislatif
16. Kinerja lembaga yudikatif
17. Netralitas penyelenggaraan Pemilu
18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian dan ruang hidup masyarakat
20. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD oleh pemerintah
21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
22. Pendidikan politik pada kader partai politik

Rendahnya capain nilai indikator 15 yang merupakan persentase Peraturan Daerah yang disahkan terhadap target Program Pembentukan Perda (Propemperda) menunjukkan bahwa tidak semua target produk hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta dapat diselesaikan oleh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan kinerja anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang masih belum sesuai dengan harapan, karena penyelesaian pembahasan peraturan perundang-undangan yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah tidak dapat tuntas diselesaikan. Pada tahun 2023 dari total target Propemperda hanya sebanyak tujuh Perda yang disahkan, atau mencapai 36,84 persen.

Indikator 19 termasuk indikitor dalam ranah dimensi politik dan sosial, berupa jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Kualitas lingkungan dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan maupun pemerintah. Kualitas lingkungan lingkungan yang baik membantu masyarakat untuk memiliki kualitas dan ketahanan hidup yang baik, termasuk dari ancaman adanya bencana alam. Kualitas lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerinth dan masyarakat secara bersama-sama. Masih rendahnya nilai indikator 19 di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 memberikan gambaran atau menjadi indikasi bahwa aktivitas terkait dengan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan masih belum sesuai dengan yang seharusnya.

Perkembangan seluruh indikator Indeks Demokrasi Indonesia sepanjang tahun 2021 - 2023 ditampilkan pada Gambar 3.8. Indikator yang nilainya mengalami perubahan menjadi lebih besar cukup besar adalah indikator 3 (naik 25,27) dan 18 (naik 50,00). Indikator yang nilainya

https://jakarta.bps.go.id

mengalami perubahan menjadi lebih kecil paling banyak terdapat pada indikator 6 (turun 10,99) dan 15 (turun 9,31)

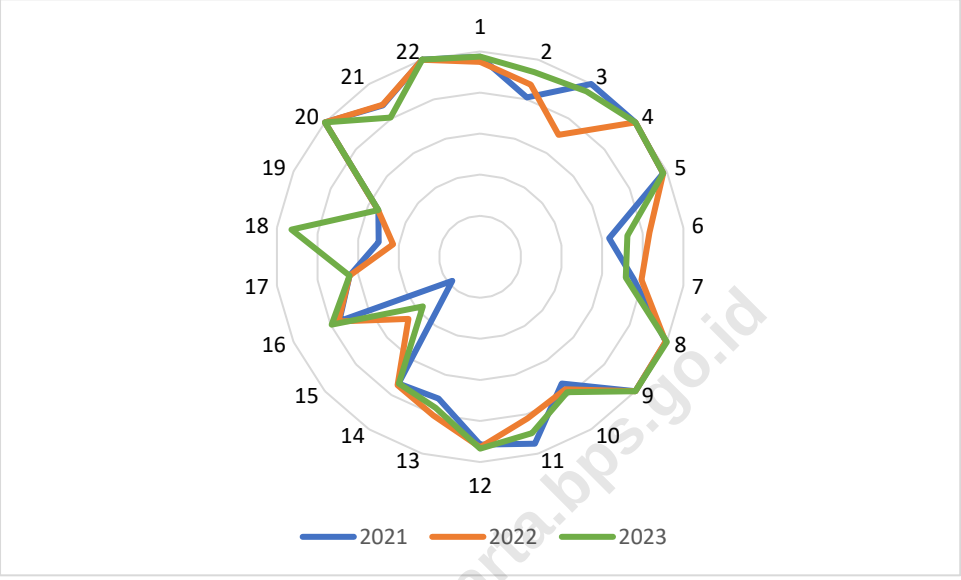

Gambar 3.8 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Indikator, 2021–2023

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Tabel Statistik Metode Baru: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi 2021–2023*. Jakarta. Diakses pada 5 Agustus 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2022*. Jakarta. Diakses pada 5 Agustus 2024.

DPRD DKI Jakarta. (2024). *Program Legislasi Daerah (Propemperda) DKI Jakarta 2023*. Diakses pada 10 Desember 2024.

Hidayat, S. (2024). *Stagnasi Demokrasi, Bahaya Personalisasi Pemerintahan, dan Urgensi Pendidikan Politik*. *Jurnal Demokrasi Bakesbagpol DKI Jakarta*, 1.

Nuha, A. U., et al. (2021). *Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia*. Jakarta.

Rauf, M., Mulia, M., Hidayat, S., & Gismar, A. M. (2020). *Indonesia Democracy Index*. Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP).

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

https://jakarta.bps.go.id

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://jakarta.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493, Fax: (021) 3152004,
E-mail : bps3100@bps.go.id, Homepage: https://jakarta.bps.go.id/